STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MELALUI PROGRAM ''PELIBATAN PESERTA DIDIK MELALUI DUKUNGAN KELUARGA" PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN DONGGALA

Enggar Puspita Astri
NPP. 33.0876
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: epa.rgy9@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dedy Pribadi Uang, S.STP., M.Si
Email: idedpribadi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research is motivated by the problem of low voter participation in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Donggala Regency, which only reached 73.40% and failed to meet the initial target of 80%, as well as the targeting discrepancy in the implementation of the program that relied on educational infrastructure.* ***Purpose****: The purpose of this study is to examine the implementation and analyze the strategy to increase voter participation through the "Student Involvement Through Family Support" program during the 2024 Simultaneous Regional Elections in Donggala Regency.* ***Method:*** *The research method used is a qualitative approach with a descriptive research design, collecting data through in-depth interviews, structured interviews, and document analysis, which is then analyzed using the Public Sector Strategic Planning theory.* ***Result:*** *The findings indicate that the strategy had several operational weaknesses, including the dominance of elementary school students' participation at 54.02% who do not yet have voting rights and democratic maturity, an excessively short socialization timeframe, the weak enforcement of academic sanctions, and the lack of a specific budget which ultimately burdened school operations, reducing the instructions to mere formalities without triggering organic political discourse within the family.* ***Conclusion:*** *The conclusion of this study states that the student involvement program has not been successful due to a targeting error and operational obstacles in the field, which caused the program to fail in boosting voter participation to meet the expected target. Keywords: Donggala Regency, Regional Elections, Strategic Management, Students, Voter Participation.*

Keywords: *Donggala Regency, Local Elections (Pilkada), Strategic Management, Students, Voter Participation.*

.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Donggala yang hanya terealisasi sebesar 73,40% dan gagal memenuhi target awal 80%, serta adanya ketimpangan sasaran pada pelaksanaan program yang mengandalkan infrastruktur pendidikan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sekaligus menganalisis strategi peningkatan partisipasi pemilih melalui program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga" pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, wawancara terstruktur, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teori Perencanaan Strategis Sektor Publik. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi tersebut memiliki beberapa kelemahan operasional, di antaranya dominasi pelibatan pada siswa Sekolah Dasar sebesar 54,02% yang belum memiliki hak pilih dan kematangan berdemokrasi, durasi waktu sosialisasi yang terlampau sempit, lemahnya penegakan sanksi akademik, serta ketiadaan anggaran spesifik yang justru membebani operasional sekolah sehingga instruksi tereduksi menjadi sekadar formalitas tanpa memicu diskursus politik organik di dalam keluarga. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa program pelibatan peserta didik tersebut belum berhasil karena adanya kesalahan penargetan sasaran (*targeting error*) dan hambatan operasional di lapangan yang membuat program gagal mendongkrak partisipasi pemilih sesuai dengan target yang diharapkan.

Kata Kunci: Kabupaten Donggala, Manajemen Strategis, Partisipasi Pemilih, Peserta Didik, Pilkada.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali. Tujuan dari Pemilu ini adalah untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), yang pelaksanaannya harus didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Bawaslu, 2023). Prinsip-prinsip ini pula yang mutlak harus diterapkan tidak hanya pada pemilihan tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara di era Reformasi Indonesia. Pilkada adalah proses pemilu lokal yang mendidik kesadaran demokrasi publik dan menjadi bukti implementasi sistem kedaulatan rakyat yang demokratis (Ligua et al., 2022). Dengan kata lain, Pilkada bukan sekadar rutinitas prosedural pergantian kekuasaan belaka, melainkan momentum krusial bagi masyarakat daerah untuk secara aktif menentukan arah pembangunan wilayahnya.

Sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan, Pilkada memungkinkan masyarakat memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota (Titania & Nawangsari, 2025). Indonesia yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota (Mewoh, 2015). Khusus di tingkat daerah, Pilkada menjadi arena paling krusial bagi masyarakat lokal untuk secara langsung menentukan figur yang akan mengelola pemerintahan

dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Keberhasilan Pilkada sangat tergantung pada tingkat Partisipasi Politik masyarakat, yang merupakan penentu legitimasi kepemimpinan daerah. Secara yuridis, urgensi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pendidikan politik bagi pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Implementasi pendidikan politik ini tentu tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan lingkungan terdekat pemilih, yakni keluarga.

Pilkada Serentak Nasional 2024 tercatat sebagai rekor partisipasi pemilih terendah sejak 2015. Data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU (dengan 98,5% data masuk) menunjukkan partisipasi hanya 68,16 persen. Capaian ini lebih rendah dibandingkan gelombang pertama Pilkada 2015 (69,06%) dan jauh di bawah Pilkada 2017, 2018, serta 2020 yang rata-rata partisipasinya mencapai 73% hingga 76%. Penurunan angka partisipasi yang cukup drastis ini mengindikasikan adanya tantangan serius yang menuntut evaluasi menyeluruh serta perumusan strategi baru guna membangkitkan kembali antusiasme pemilih (Basyari, 2024).

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula meningkat setelah diadakannya sosialisasi politik yang bersifat edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang disampaikan secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran politik secara signifikan (Uddin et al., 2023). Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai proses politik dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dalam tataran yang lebih sempit, bisa dalam bentuk partisipasi warga negara pada setiap Pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Mengingat pentingnya kedekatan kontekstual dalam pendidikan politik tersebut, pendekatan sosialisasi yang melibatkan lingkungan terdekat, seperti keluarga, menjadi sangat relevan dan strategis untuk diterapkan.

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik di tingkat perumusan regulasi (Suryaningsih et al., 2025). Kebijakan yang memberi kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah sejatinya lahir dari proses politik legislasi yang kompleks. Amandemen konstitusi yang merumuskan regulasi desentralisasi pada dasarnya merupakan hasil langsung dari negosiasi dan tawar-menawar antaranggota parlemen melalui pembangunan jaringan politik informal.(Baidhowah, 2022) Kebijakan strategis dari parlemen inilah yang kemudian memfasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam mengelola kewenangannya sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat landasan hukum yang dibentuk sejak fase konsensus politik nasional.

Berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2018, yang disebut sebagai pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun. Selain itu, WNI yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah juga dikategorikan sebagai pemilih pemula. Seorang pemilih pemula wajar jika belum berpengalaman dalam proses pemilihan pemimpin. Kendati demikian, minimnya pengalaman tersebut semestinya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk turut serta memberikan suara (*voting*) dalam perhelatan demokrasi. Salah satu faktor kunci dalam kepemimpinan pemerintahan yang kredibel adalah aspek *Policy* (Kebijakan), di mana pemimpin harus memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan publik yang tepat guna dalam merespons dinamika di masyarakat. Keberhasilan formulasi strategi peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Donggala tidak terlepas dari peran kepemimpinan pemerintahan yang mampu melahirkan kebijakan responsif (Uang et al., 2023).

Sebagai upaya konkret menjawab tantangan rendahnya partisipasi pemilih di daerah,

Pemerintah Kabupaten Donggala meluncurkan kebijakan strategis berupa program *"Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga."* Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 270/1843/DISDIKBUD/2024 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala pada 28 Oktober 2024. Latar belakang pelaksanaan program ini adalah keberhasilan inovasi serupa pada Pemilu Legislatif 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Donggala meningkat dari 78,68% pada Pemilu 2019 menjadi 80% pada Pemilu 2024 setelah diterapkannya pelibatan peserta didik dalam pendidikan politik. Dengan kata lain, replikasi kebijakan ini pada Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar uji coba, melainkan langkah strategis berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Donggala untuk merawat dan meningkatkan kesadaran politik warganya.

Program yang dimaksud adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Donggala khususnya Sekretaris Daerah, yang dituangkan secara formal melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 270/1843/DISDIKBUD/2024. Surat edaran ini menginstruksikan pelibatan peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK, yang memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Mekanisme utama dari program ini adalah melalui penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Melalui instrumen ini, para siswa diberi tugas terstruktur untuk mendata anggota keluarga mereka sendiri, kemudian memverifikasi apakah anggota keluarga mereka sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan selanjutnya mencari tahu di mana lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan oleh keluarga mereka. Secara implisit, rangkaian tugas ini juga mendorong siswa untuk berperan aktif mengingatkan dan mengajak keluarga mereka agar menggunakan hak pilihnya.

Program ini menyasar seluruh tingkat sekolah di Kabupaten Donggala, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Mekanisme pelaksanaannya berbeda berdasarkan kurikulum yang digunakan sekolah yakni: (1) Sekolah dengan Kurikulum 2013 (K13) dengan tema Kesadaran Berdemokrasi diintegrasikan dalam Pembelajaran Berbasis Projek melalui mata pelajaran PPKn atau mata pelajaran lain yang relevan. (2) Sekolah dengan Kurikulum Merdeka (IKM) melalui program yang diimplementasikan dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema "Suara Demokrasi". Tujuan utama dari program ini ada dua. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024, dengan target mempertahankan capaian 80% atau bahkan meningkat. Kedua, membangun karakter demokratis peserta didik dengan menanamkan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, menghargai perbedaan, independensi, dan kepedulian sosial. Urgensi penerapan kembali strategi ini didasarkan pada klaim keberhasilan yang dicapai pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran Bupati Donggala Nomor 270/1843/DISDIKBUD/2024, Pemerintah Kabupaten Donggala menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan inovasi kebijakan ini. Keterlibatan institusi pendidikan dipandang sangat krusial, mengingat sekolah merupakan wadah strategis untuk menyebarkan nilai-nilai pendidikan politik secara terstruktur dari siswa kepada lingkungan keluarganya. Pelaksanaan program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga" mencakup secara luas berbagai institusi pendidikan di Kabupaten Donggala, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Mengingat luasnya cakupan jenjang pendidikan yang terlibat, diperlukan adanya penyesuaian materi agar instrumen pendidikan politik yang diberikan selaras dengan kapasitas kognitif siswa dan kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing sekolah, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka (P5). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan efektivitas program, pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaannya dengan menyusun modul pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan tingkatan sekolah. Pada Pemilu Legislatif 2019, tingkat partisipasi masyarakat tercatat sebesar 78,68%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada

Pemilu Legislatif 2024 menjadi 80%, tepat saat program pelibatan peserta didik diterapkan secara intensif. Kenaikan ini menjadi dasar keyakinan Pemerintah Daerah bahwa strategi pelibatan siswa merupakan variabel determinan dalam mendongkrak angka partisipasi pemilih. Namun, efektivitas strategi tersebut menghadapi tantangan anomali ketika diterapkan pada konteks Pilkada Serentak. Jika dibandingkan dengan capaian Pilkada sebelumnya (2018) dan target 2024, realisasi di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda.

Jumlah DPT sejumlah 202.147 pemilih dengan pengguna hak pilih 154.648 pemilih yang menghasilkan 76,50% persentase partisipasi pemilih. Kemudian pada tabel 1.4 dicantumkan data setelah program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga" diterapkan kembali ke Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala. Masalah faktual (*empirical problem*) penelitian ini. Meskipun menggunakan strategi yang sama dengan Pileg 2024, realisasi partisipasi pada Pilkada Serentak 2024 justru turun drastis menjadi 73,40%. Angka ini tidak hanya gagal mencapai target 80%, tetapi juga lebih rendah dibandingkan capaian Pilkada 2018 yang berada di angka 76,50%. Penurunan ini mengindikasikan adanya inefektivitas strategi atau resistensi yang tidak terdeteksi pada perencanaan awal.

Kondisi faktual tersebut melahirkan masalah konseptual *(conceptual problem*) ketika dianalisis menggunakan pendekatan Perencanaan Strategis Sektor Publik dari Bryson & George (2024). Dalam perspektif ini, terdapat kesenjangan (*gap*) yang serius antara Mandat Formal (*Formal Mandates*) berupa Surat Edaran Dinas dengan Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*) di lapangan. Secara teoretis, mandat formal seharusnya mampu menciptakan kepatuhan dan partisipasi. Namun, kegagalan pencapaian target menunjukkan adanya hambatan pada tahap implementasi, yang diduga berkaitan dengan lemahnya legitimasi atau kredibilitas kepemimpinan pemerintahan (*credible government leadership*) dalam meyakinkan publik, sebagaimana ditegaskan oleh Uang dkk. (2023). Ketidakmampuan strategi untuk menerjemahkan mandat menjadi nilai publik (*public value*) berupa partisipasi pemilih menuntut adanya evaluasi mendalam. Meskipun strategi yang digunakan sama persis dengan Pileg, data faktual menunjukkan adanya anomali hasil pada Pilkada Serentak 2024. Target partisipasi sebesar 80% tidak tercapai, dengan realisasi hanya berhenti di angka 73,40%. Penurunan tren ini mengindikasikan bahwa strategi yang sebelumnya dianggap efektif, ternyata mengalami penurunan kinerja (inefektivitas) pada tataran implementasi di lapangan. Kesenjangan (gap) antara klaim keberhasilan masa lalu dengan realita kegagalan target saat ini menuntut adanya evaluasi mendalam mengenai konsistensi pelaksanaan strategi tersebut. Mengingat pendekatan ini melibatkan ekosistem pendidikan yang luas dan menjadikannya sebagai agen sosialisasi politik keluarga, hal ini memunculkan ketertarikan akademis mengenai bagaimana strategi ini diimplementasikan, serta hambatan apa saja yang mungkin terjadi di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam mengenai jalannya kebijakan tersebut dan mengapa program ini hanya efektif di Pemilihan Umum Legislatif tidak pada Pilkada Serentak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diangkat ke dalam skripsi dengan judul: "Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Melalui Program 'Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga' pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara keberhasilan program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga" pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan hasil yang tidak sesuai harapan pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Donggala. Secara faktual (*empirical gap*), program yang sama berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2024 menjadi 80% (naik dari 78,68% pada 2019). Namun, pada Pilkada Serentak 2024,

partisipasi justru menurun menjadi 73,4%, lebih rendah dibandingkan Pilkada 2018 yang mencapai 76,5%. Padahal program ini tetap diterapkan secara masif melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 270/1843/DISDIKBUD/2024, modul kesadaran berdemokrasi, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) di seluruh jenjang sekolah.

Kesenjangan konseptual (*conceptual gap*) muncul ketika fenomena tersebut dianalisis melalui lensa manajemen strategis sektor publik Bryson & George (2024). Terdapat *disconnect* antara dimensi Mandat dan Perencanaan (yang memiliki legitimasi hukum kuat) dengan Implementasi Tindakan Strategis, Pengorganisasian Sumber Daya, Komunikasi Strategis, serta Pengawasan dan Evaluasi. Strategi "nol rupiah" yang mengandalkan infrastruktur pendidikan dan siswa sebagai agen sosialisasi politik keluarga ternyata tidak konsisten efektivitasnya antar jenis pemilu. Faktor kontekstual seperti isu Pilkada yang kurang menarik, hambatan geografis, keterbatasan akses digital di pelosok, sinkronisasi jadwal akademik, serta tingkat keterlibatan siswa (terutama SD/SMP yang belum memiliki hak pilih) menjadi variabel yang diduga menyebabkan penurunan kinerja strategi tersebut. Selain itu, terdapat *research gap* dalam literatur sebelumnya yang mayoritas berfokus pada peran KPU dalam sosialisasi konvensional atau program "KPU *Goes to School*". Kajian tentang model top-down dari Pemerintah Daerah yang menjadikan siswa sebagai agen aktif micro-targeting keluarga melalui LKPD masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam mengapa strategi inovatif yang sama menghasilkan output berbeda, serta hambatan implementasi di lapangan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya permasalahan nyata terkait menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya mencapai 73,40%, lebih rendah dibandingkan partisipasi pada Pilkada 2018 yang mencapai 76,50%. Kondisi ini menjadi paradoks karena pada Pemilu Legislatif 2024 tingkat partisipasi justru mengalami peningkatan menjadi 80% setelah diterapkannya program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga". Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang berhasil pada konteks Pemilu Legislatif belum tentu menghasilkan efektivitas yang sama pada Pilkada Serentak, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi program tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena rendahnya partisipasi pemilih dapat berdampak pada kualitas demokrasi lokal dan legitimasi pemerintahan daerah yang dihasilkan melalui proses pemilihan. Tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Semakin rendah keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin besar pula potensi munculnya persoalan representasi politik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa mendatang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Secara akademis, penelitian ini juga memiliki urgensi karena masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi strategi peningkatan partisipasi pemilih melalui pendekatan pendidikan politik berbasis keluarga dan sekolah. Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada strategi komunikasi, sosialisasi politik, pendidikan pemilih pemula, dan pemanfaatan media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih sedikit penelitian

yang mengkaji bagaimana strategi pelibatan peserta didik sebagai agen sosialisasi politik dalam lingkungan keluarga diterapkan, khususnya pada konteks daerah dengan kondisi geografis yang luas dan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Donggala. Penelitian oleh Fadilla & Nurussa'adah (2022), menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kombinasi sosialisasi virtual, tatap muka terbatas, dan pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2020. Sementara itu, penelitian Irwan et al. (2023) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi politik di lingkungan sekolah memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda sebagai pemilih pemula.

Penelitian Ni Made Wijayanti Kusuma Ardani dkk. (2023) menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi peningkatan partisipasi pemilih dan merekomendasikan penguatan program berbasis masyarakat seperti Desa Peduli Pemilu. Selanjutnya, penelitian Rafi' Alra (2023) menyoroti pentingnya regulasi pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebagai instrumen pendukung peningkatan partisipasi pemilih. Penelitian Paluvi et al. (2024) mengenai implementasi program KPU Goes to School menunjukkan bahwa pendidikan politik di lingkungan sekolah dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula meskipun menghadapi kendala keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan demokrasi bagi generasi muda.

Selanjutnya, penelitian Harianja et al. (2024) mengkaji strategi KPU Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui tahapan perencanaan strategis yang meliputi pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan strategi secara sistematis. Penelitian Noya (2025) menemukan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan KPU Kota Ambon belum berjalan optimal karena adanya hambatan sosial, budaya, geografis, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor kontekstual daerah menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan strategi peningkatan partisipasi pemilih.

Penelitian Fathurrijal dkk. (2024) menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang mengintegrasikan pendidikan politik, media lokal, pendekatan budaya, dan simulasi pemungutan suara mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu. Sementara itu, penelitian Alfitra (2024) mengungkap bahwa daerah dengan tingkat partisipasi rendah memerlukan pendekatan pendidikan pemilih yang lebih adaptif karena masih menghadapi kendala rendahnya literasi politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan akses informasi. Terakhir, penelitian Asri et al. (2025) mengenai strategi KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan karakteristik sosial masyarakat menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan strategi peningkatan partisipasi pemilih. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Program pelibatan siswa di Kabupaten Donggala hadir menawarkan kebaruan (*novelty*) yang signifikan justru untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut. Kebaruan utamanya terletak pada pergeseran paradigma fundamental, yaitu dari "mensosialisasikan kepada siswa" menjadi "mensosialisasikan melalui siswa". Kebaruan ini terlihat dari beberapa aspek. Inisiatif program ini datang dari Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah), bukan KPU, yang menunjukkan model kolaborasi multi-stakeholder di mana Pemda mengambil peran proaktif. Kebaruan terbesar terletak pada mekanismenya, yakni penggunaan LKPD. Ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan sebuah

intervensi perilaku (*behavioral intervention*) spesifik yang "memaksa" siswa secara halus untuk berdiskusi tentang pemilu di rumah, mengecek NIK, dan memverifikasi status DPT. Ini adalah bentuk micro-targeting di level rumah tangga dengan siswa sebagai "enumerator" informal. Dengan demikian, target intervensi yang sebenarnya adalah orang tua atau anggota keluarga dewasa yang mungkin apatis, di mana siswa menjadi "jembatan" yang efektif. Akhirnya, program ini memiliki kebaruan dalam pendekatannya yang terintegrasi dengan kurikulum formal, yakni "Pembelajaran Berbasis Projek" dan "P5" (Profil Pelajar Pancasila), sehingga melegitimasi kegiatan ini sebagai bagian dari proses belajar demokrasi secara praktik.

1.6. Tujuan

Penelitian Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih melalui program ”Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga” pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga sebagai strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, interpretasi, dan pemaknaan para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai latar belakang, proses pelaksanaan, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas suatu program.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis maupun mencari hubungan sebab akibat antarvariabel, melainkan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi pemilih yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Donggala melalui pelibatan peserta didik sebagai agen pendidikan politik dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana strategi tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Fokus penelitian ini adalah strategi peningkatan partisipasi pemilih melalui Program Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah, fokus penelitian dianalisis menggunakan teori manajemen strategis sektor publik yang dikembangkan oleh Bryson & George (2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui proses wawancara mendalam. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program, pengalaman para pelaksana, serta berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang

berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 270/1843/DISDIKBUD/2024, Modul Kesadaran Berdemokrasi, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), laporan pelaksanaan program, data partisipasi pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh dari lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang luas sekaligus memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Wawancara dilakukan kepada seluruh informan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati kondisi lingkungan, aktivitas pelaksanaan program, serta interaksi yang terjadi antara pihak sekolah, peserta didik, dan keluarga dalam pelaksanaan program. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti surat edaran, modul pembelajaran, LKPD, laporan kegiatan, foto pelaksanaan program, dan data statistik partisipasi pemilih. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles et al. (2020) Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan disisihkan. Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, tabel, matriks, maupun kutipan hasil wawancara sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar informasi yang ditemukan di lapangan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah dianalisis untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar temuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan data pada waktu yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Pelaksanaan Program Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala

Bagian ini merupakan inti dari analisis penelitian yang bertujuan untuk membedah secara mendalam strategi Pemerintah Kabupaten Donggala dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Analisis dilakukan dengan mensinergikan kerangka proses *Strategic Change Cycle* dan evaluasi kinerja melalui perspektif Strategic Effectiveness. Manajemen strategis di sektor publik merupakan upaya deliberatif yang disiplin untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk arah organisasi. Melalui lima dimensi analisis yang telah ditetapkan, peneliti akan mengevaluasi bagaimana setiap tahapan strategi mulai dari perencanaan hingga komunikasi dilaksanakan di lapangan. Melalui lima dimensi analisis yang telah ditetapkan, peneliti akan mengevaluasi bagaimana setiap tahapan strategi mulai dari perencanaan hingga komunikasi diimplementasikan di lapangan.

Lebih lanjut, analisis ini tidak hanya melihat sisi proses, tetapi juga menguji capaian performa untuk mengukur efektivitas strategisnya. Manajemen strategis harus mampu menutup celah antara target kinerja yang direncanakan dengan realitas hasil di lapangan. Dengan demikian, analisis per dimensi di bawah ini akan mengungkap sejauh mana formulasi dan pelaksanaan strategi yang telah dijalankan mampu memitigasi hambatan partisipasi masyarakat, sekaligus membedah faktor-faktor yang menyebabkan realisasi capaian sebesar 73,4% belum mampu memenuhi target ideal yang ditetapkan sebesar 80%.

3.2. Analisis Dimensi Mandat dan Perencanaan

Identifikasi mandat merupakan langkah fundamental dalam kerangka *Strategic Change Cycle*, di mana organisasi publik beroperasi berdasarkan batasan dan legitimasi instruksi formal. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Donggala, mandat formal ini berakar pada kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 270/1843/DISDIKBUD/2024. Hal ini ditegaskan secara empiris melalui pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. H. Rustam Effendi, dalam wawancara pada 05 Januari 2026 yang menyatakan:

> Di Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 434 Ayat (2) huruf (d) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatlan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah dari situ saya membuat program ini.

Mandat hukum yang kuat ini menjadi landasan pacu yang melegitimasi aparatur untuk mengubah institusi pendidikan menjadi instrumen sosialisasi politik yang aktif. Pendekatan legal-formal terstruktur seperti ini memiliki kemiripan dengan temuan penelitian, yang menyimpulkan bahwa perumusan strategi partisipasi pemilih tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang secara makro, melainkan mutlak membutuhkan pedoman strategis dan penelaahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang adaptif terhadap kondisi kelembagaan lokal agar memiliki pijakan eksekusi yang kuat. (Harianja et al., 2024)

Pemanfaatan sarana pendidikan secara sistematis ini membuktikan adanya perencanaan yang lebih komprehensif bila dikomparasikan dengan pelaksanaan program kepemiluan konvensional di daerah lain. Sebagai perbandingan, program "KPU *Goes to School*" di Kabupaten Bungo menemukan bahwa perencanaan program sosialisasi yang kurang matang dan tidak terintegrasi dengan kurikulum justru menimbulkan kendala keterbatasan waktu yang membebani aktivitas akademik sekolah. Sebaliknya, perencanaan strategis Donggala yang diikat oleh Surat Edaran mampu memitigasi gesekan akademis ini, sebuah pendekatan yang keefektifannya sejalan dengan kajian di Palangka

Raya, yang menegaskan bahwa sosialisasi pemilu akan jauh lebih efektif dan tidak sporadis apabila disinergikan secara kelembagaan dengan pihak sekolah sebagai mitra penyedia edukasi pemilih pemula (Irwan et al., 2023).

Meskipun secara administratif terdapat persinggungan kewenangan, mandat tersebut tetap diterima karena adanya keselarasan nilai publik (public value) yang ingin dicapai, yaitu kesuksesan Pilkada. Perencanaan strategis didefiniskan sebagai *"a deliberative, disciplined effort to produce fundamental decisions and actions"*. Keputusan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mengintegrasikan program ini ke dalam kurikulum merdeka merupakan bentuk upaya disiplin dalam memilih metode yang paling efisien. Sekretaris Daerah menjelaskan logika perencanaan ini:

> Berhubung mereka belajar P5 temanya ada itu suara demokrasi, jadi kemudian saya memilih sekolah-sekolah agar peserta didik yang menggerakkan orang tua mereka di rumah... Peserta didik secara langsung praktek ke orang tua mereka, mereka gunakan bahasa mereka sendiri bagaimana mengajak orang tua untuk memilih.

Integrasi dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah langkah perencanaan strategis yang cerdas karena tidak menambah beban kurikulum baru, melainkan memperkaya praktik pembelajaran yang sudah ada. Integrasi dari berbagai pemangku kepentingan pada tahap formulasi mandat ini sejalan dengan penemuan ilmiah, di mana strategi sosialisasi pemilihan umum akan kehilangan gaungnya apabila lembaga penyelenggara tidak berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah kota dan instansi komunitas lokal. Namun, perencanaan yang matang harus melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh sejak awal. Pada titik inilah ditemukan celah koordinasi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Kesbangpol: "Ini surat edarannya dari Pak Sekda untuk ada programnya, karena tidak ada disampaikan saya bingung juga baru saya dengar makanya tidak ada juga tujuan ke Kesbangpol. Padahal kita disini ada bidang politik." Ketidaklibatan aktor kunci seperti Kesbangpol dalam fase perencanaan awal menunjukkan bahwa proses deliberatif belum berjalan secara maksimal lintas sektor. Hal ini dipertegas oleh Kepala Cabang Dinas II mengenai minimnya koordinasi formal: "Kalau kita bicara soal koordinasi formal, jujur saja kami di Cabang Dinas baru tahu detail program ini setelah Surat Edarannya keluar. Hampir tidak ada koordinasi formal di awal yang melibatkan kami dalam penyusunan instrumen atau penentuan target." Kegagalan segmentasi audiens ini sebetulnya bisa dicegah, merujuk pada temuan riset di Kabupaten Malang, yang menyoroti bahwa KPU selaku perumus strategi harus mampu memetakan secara presisi wilayah dan segmen demografi mana saja yang memiliki akar potensi partisipasi rendah, sehingga anggaran dan intervensi kebijakan tidak terbuang sia-sia pada kelompok umur yang kurang strategis daya dorongnya.

Analisis Dimensi Mandat dan Perencanaan ini menunjukkan bahwa secara administratif dan legal-formal, Pemerintah Kabupaten Donggala telah berhasil merumuskan landasan kebijakan yang otentik melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang sangat *legitimate* dan sejalan dengan perintah undang-undang. Upaya mengawinkan instruksi kebijakan ini dengan pedoman kurikulum Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) juga membuktikan hadirnya perumusan strategi yang kolaboratif, aman dari tumpang-tindih instruksional, serta lebih unggul secara konsep jika dibandingkan sosialisasi konvensional dari pintu ke pintu. Akan tetapi, apabila diuji secara holistik melalui pisau analisis efektivitas strategis, kualitas perencanaan ini masih menyimpan kelemahan substansial. Kesenjangan antara mandat yang diinstruksikan dengan capaian persentase di Tempat Pemungutan Suara (TPS) utamanya disumbang oleh kekeliruan pemetaan profil agen sosialisasi, di mana program terjebak pada capaian kuantitas massal peserta didik sekolah dasar daripada membidik kualitas diskursus politik pada pemilih pemula tingkat sekolah menengah. Akibatnya, meskipun mandat ini memiliki tingkat kepatuhan birokrasi yang impresif dari kepala sekolah hingga guru, ia

belum memiliki rasionalitas perancangan dan ketajaman sasaran yang memadai untuk benar-benar menambal kebocoran angka partisipasi masyarakat sesuai target ideal yang ditetapkan pada Pilkada Serentak 2024.

3.3. Analisis Dimensi Pengorgnisasian Sumber Daya

Pelaksanaa Dalam kerangka *Strategic Change Cycle*, setelah mandat dan perencanaan ditetapkan, organisasi publik harus melakukan pengorganisasian sumber daya untuk mengubah rencana menjadi tindakan strategis. Pengorganisasian sumber daya di sektor publik sering kali membutuhkan kolaborasi lintas batas di mana pemerintah daerah memobilisasi sumber daya manusia (Bryson & George, 2024), finansial, dan struktural untuk mencapai tujuan publik secara efisien. Dalam konteks peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan manuver pengorganisasian sumber daya yang sangat masif dengan memanfaatkan jaringan birokrasi pendidikan sebagai substitusi atas keterbatasan personel penyelenggara pemilu. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan strategis yang signifikan jika dikomparasikan dengan temuan penelitian terdahulu mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Malang. Dalam penelitian tersebut, KPU Kabupaten Malang mengorganisasikan sumber dayanya secara taktis dengan cara melakukan pemetaan wilayah secara spesifik; mereka hanya menetapkan target pendidikan pemilih di 6 kecamatan dari total 33 kecamatan yang teridentifikasi memiliki sejarah potensi partisipasi rendah, yaitu Kecamatan Kepanjen, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Dau, dan Pakis. Sebaliknya, pengorganisasian sumber daya di Kabupaten Donggala justru bersifat sapu jagat ke seluruh kecamatan tanpa pemetaan kerawanan daerah, di mana ratusan sekolah dan ribuan guru secara serentak dikonversi menjadi mesin penggerak strategi.

Kolaborasi lintas batas (*boundary-crossing*) ini juga merambah ke instansi vertikal seperti Kementerian Agama. Untuk menyiasati keterbatasan waktu dan padatnya kurikulum, sumber daya guru Madrasah diorganisir agar tidak merasa terbebani. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Donggala:

> Tantangannya tentu ada pada teknis pembagian waktu. Namun, karena program ini dimasukkan melalui pendekatan dukungan keluarga, kami arahkan para guru untuk menyelipkannya dalam mata pelajaran yang relevan, seperti Akidah Akhlak atau Fikih yang membahas tentang tanggung jawab sebagai warga negara.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya manusia tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga adaptif terhadap ekosistem kerja di masing-masing instansi. Selain tenaga penggerak, instrumen utama program ini (Modul dan LKPD) juga dirancang dengan mengorganisir sumber daya intelektual lokal. Pemda tidak menggunakan pihak ketiga (konsultan), melainkan membentuk tim penyusun dari unsur pendidik itu sendiri agar bahasa dan metodologinya tepat sasaran. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sirenja selaku Tim Penyusun Modul mengonfirmasi pengorganisasian kompetensi ini: "Yang terlibat dalam tim penyusunan Modul adalah orang-orang yang mengikuti pelatihan tentang penyusunan modul “Kesadaran Berdemokrasi” yang terdiri dari Widyaiswara yakni Pak Abu Hasan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru."

Konsep efektivitas strategis menyoroti adanya gesekan yang parah ketika pelaksanaan sasaran kinerja tidak didukung oleh kesiapan sumber daya secara spesifik. Pembebanan program sosialisasi Pilkada pada infrastruktur pendidikan Donggala merupakan bentuk pemanfaatan *existing resources* (sumber daya yang sudah ada) yang dipaksakan secara tiba-tiba tanpa perencanaan alokasi yang terpisah (Bryson & George, 2024). Praktik penggunaan *existing resources* secara dadakan untuk program Pilkada ini sangat mengganggu kegunaan sumber daya yang sudah ada, karena secara langsung mengalihkan fokus tenaga pengajar, waktu belajar siswa, dan anggaran sekolah dari fungsi

utama pelayanan pendidikan formal. Sistem penggunaan *existing resources* secara dadakan ini tidak seharusnya dilakukan. Kebijakan publik yang baik mensyaratkan bahwa tahapan pelaksanaan dan evaluasi membutuhkan alokasi waktu, sumber daya, dan energi secara mandiri dan efektif agar tidak mengorbankan kualitas sektor lainnya. Secara teoretis, organisasi pemerintah yang dipaksa menghadapi tekanan perubahan strategi tanpa dukungan sumber daya yang relevan akan mengalami penurunan kemampuan pelaksanaan strategis yang berujung pada anomali kegagalan target (Putri et al., 2025). Hal inilah yang menjadi faktor penjelas mengapa program tersebut mengalami inefektivitas manajerial dan gagal mencapai target 80%, serta terpuruk pada realisasi angka partisipasi 73,40% pada Pilkada Serentak 2024 (Wan et al., 2022).

Kondisi pengorganisasian ini sangat bertolak belakang dengan literatur manajemen sektor publik dan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa program pendidikan politik yang sistemik mutlak membutuhkan alokasi sumber daya yang tepat dari penyelenggara yang profesional dan akuntabel. Penyelenggara seperti KPU memiliki tanggung jawab wajib untuk merumuskan program strategis dengan ketersediaan dana yang memadai seperti program "Desa Peduli Pemilu" agar ketidakseimbangan alokasi dana tidak menjadi kendala dalam merespons permasalahan riil pemilih di lapangan. Ketergantungan pada fasilitas mandiri sekolah (seperti Dana BOS) dan gawai pribadi siswa di Donggala mencerminkan kebijakan yang tidak berkelanjutan yang membebankan biaya operasional negara kepada unit sekolah dan rumah tangga. Tanpa pembagian segmen pemilih strategis yang jelas, upaya edukasi akan membentur kendala kurangnya respons masyarakat akibat penyampaian sosialisasi yang sporadis dan memberatkan aktor di luar institusi kepemiluan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu mengenai program KPU *Goes To School*, yang menyatakan bahwa pelibatan institusi pendidikan memang efektif menjangkau pemilih pemula, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran, waktu, dan jumlah peserta (Paluvi et al., 2024).

Kondisi keterbatasan tersebut dirasakan dalam pelaksanaan program di Donggala, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Kepala Sekolah di Kecamatan Banawa dalam wawancara pada tanggal 12 Januari 2026:

> Kami diinstruksikan oleh instansi terkait untuk melaksanakan program penugasan LKPD ini di tengah jadwal akademik yang sudah sangat padat, di mana kami murni harus menggunakan dana operasional sekolah yang ada dan membebani tenaga guru tanpa dukungan logistik tambahan dari Pemda, sehingga praktis hal ini sangat menyulitkan operasional harian sekolah.

Pernyataan wawancara ini secara empiris didukung oleh data penelitian yang menegaskan bahwa terbatasnya sumber daya manusia dan literasi yang rendah menjadi tantangan sekaligus hambatan paling krusial dalam mengkonsolidasikan masyarakat pemilih di daerah (Asri et al., 2025).

Lebih lanjut, literatur mengenai manajemen sektor publik menegaskan bahwa program inovatif yang bersifat sistemik membutuhkan *dedicated budget* untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas. Menurut kebijakan publik berbasis kinerja, ketergantungan pada sumber daya yang sudah ada dapat menyebabkan goal displacement, di mana fokus pendidik bergeser dari substansi edukasi demokrasi ke tuntutan administratif pelaporan. Tanpa alokasi anggaran khusus, inisiatif ini berisiko menjadi kebijakan yang tidak berkelanjutan (*unsustainable policy*) karena membebankan biaya operasional pada unit sekolah dan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu resistensi dari pemangku kepentingan di masa depan."

3.4. Analisis Dimensi Implementasi Tindakan Strategis

Berdasarkan Implementasi tindakan strategis merupakan wujud nyata dari fase bertindak strategis dalam siklus perubahan strategis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala, implementasi ini diterjemahkan melalui pendistribusian instrumen teknis berupa Lembar

Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Modul "Kesadaran Berdemokrasi" ke ratusan sekolah di 16 kecamatan. Proses operasionalisasi mandat ini sangat sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang mengkaji program KPU Goes to School di Kabupaten Bungo, di mana program tersebut dinilai efektif sebagai instrumen pendidikan pemilih meskipun pada tataran implementasinya kerap dihadapkan pada kendala waktu dan jumlah sasaran peserta . Di Kabupaten Donggala, langkah strategis ini diambil untuk menyiasati hambatan geografis yang luas, yakni mencapai 4.275,08 km² yang terdiri dari wilayah pesisir dan pegunungan, dengan mentransformasi infrastruktur pendidikan sebagai mesin sosialisasi politik. Hal ini sejalan dengan analisis penelitian terdahulu yang menemukan bahwa hambatan geografis dan sosial-budaya seringkali membuat strategi komunikasi konvensional KPU menjadi kurang efektif, sehingga pendekatan alternatif yang menembus batas-batas geografis mutlak diperlukan (Noya, 2025).

Temuan riset yang menegaskan bahwa literasi yang rendah dan keterbatasan sumber daya manusia merupakan tantangan paling krusial dalam pelaksanaan strategi Pilkada di daerah-daerah yang sulit dijangkau (Asri et al., 2025). Di Donggala, peran siswa sebagai "penunjuk jalan teknologi" bagi orang tua yang memiliki keterbatasan literasi digital merupakan langkah yang inovatif. Walaupun modul sudah didiferensiasi, seperti siswa SD kelas rendah hanya berfokus pada pengamatan visual baliho, sedangkan SMP dan SMA difokuskan pada pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di situs Cek DPT Online, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan sasaran. Data partisipasi program menunjukkan bahwa pelaksanaan ini sangat didominasi oleh partisipasi siswa tingkat Sekolah Dasar yang mencapai 34.106 siswa. Secara teoritis, dominasi agen penyampai pesan yang masih berada di bawah umur ini menciptakan hambatan friksional dalam manajemen strategis, di mana kapasitas kognitif dan daya persuasi siswa SD dinilai belum cukup kuat untuk merubah perilaku politik orang dewasa yang apatis. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa sosialisasi pemilu jauh lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik apabila menyasar kelompok pemilih pemula (generasi Z di tingkat SMA) secara langsung (Irwan et al., 2023).

Tindakan ini menunjukkan adanya kedisiplinan operasional dalam memastikan mandat Sekda tersampaikan secara kolektif kepada wali murid melalui fasilitas sekolah.Tindakan strategis dalam program ini bersifat unik karena mengandalkan peserta didik sebagai agen komunikasi. Menurut Bryson & George (2024), keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) yang intensif diperlukan untuk menjamin keberhasilan. Dalam konteks ini, siswa melakukan "tindakan strategis" dengan mengedukasi orang tua mereka sendiri. Asfiatul Jannah (Orang Tua Muhammad Ghifari - SMA) mengonfirmasi tindakan tersebut: "Tapi anakku bilang kalau ini memang program resmi dari pemerintah daerah dan supaya siswa ikut terlibat... Terus dia jelaskan ke saya siapa-siapa saja calonnya." Kutipan ini membuktikan bahwa pada jenjang SMA, tindakan strategis berhasil mendorong terjadinya diskusi substansial (pendidikan politik) di rumah. Namun, tindakan ini tidak selalu berjalan simetris pada jenjang yang lebih rendah.

Sebagai tambahan, berbagai kajian literatur di internet dan jurnal sosiologi politik kontemporer secara umum juga menyoroti bahwa intervensi perilaku politik melalui jalur domestik (keluarga) memerlukan agen komunikasi yang dipandang memiliki kematangan berpikir oleh orang tuanya, minimal pada usia remaja akhir. Strategi Pemerintah Kabupaten Donggala yang memanfaatkan peserta didik sebagai jembatan sosialisasi di ranah domestik pada dasarnya sejalan dengan kajian sosiologi politik modern. *Active participation in multiple social networks, such as with family, friends, social groups, and organizations, facilitates youth involvement in politics* (Ida et al., 2025). Hal ini membuktikan bahwa interaksi politik yang ditumbuhkan dalam struktur keluarga memiliki potensi persuasif yang besar, meskipun realisasi di lapangan masih terhambat akibat dominasi pelaksanaan

oleh siswa tingkat dasar yang belum matang secara kognitif.

Efektivitas strategi diukur dari sejauh mana target kinerja tercapai tanpa mengorbankan stabilitas organisasi. Dalam implementasinya, program ini membebani guru secara signifikan karena mereka harus mengambil alih peran penyelenggara pemilu. Hal ini disadari oleh Komisioner KPU Donggala: "Tapi kalau dilihat dari teknis kegiatan di ruang lingkup sekolah, itu otomatis tetap akan membebani di guru... Jadi tetap, ujung-ujungnya kita akan tetap membebani guru dengan, maksudnya mungkin dengan metode pelajaran yang lebih meringankan, dengan syarat-syarat yang lebih meringankan."

Pelaksanaan dimensi implementasi tindakan strategis pada program "Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga" di Kabupaten Donggala telah berhasil mendobrak hambatan geografis dan keterbatasan personel pemerintah melalui mobilisasi infrastruktur pendidikan secara masif. Tindakan taktis melalui pembagian LKPD dan Modul Kesadaran Berdemokrasi terbukti mampu mengeksekusi mandat kebijakan hingga ke unit keluarga. Akan tetapi, berdasarkan evaluasi efektivitas, strategi ini terhambat oleh hambatan di lapangan, yakni dominasi beban eksekusi pada siswa tingkat Sekolah Dasar yang daya bujuk politiknya belum maksimal di hadapan orang tua, serta diperparah oleh kendala teknis berupa limitasi literasi digital dan akses internet di wilayah pelosok. Akibatnya, tingginya angka penetrasi program di sekolah tidak berbanding lurus dengan konversi angka partisipasi di TPS, sehingga realisasi partisipasi terhenti pada angka 73,40%, atau gagal mencapai target strategis sebesar 80%.

3.5. Analisis Dimensi Komunikasi Strategis

Dimensi komunikasi strategis dalam manajemen strategis sektor publik berfungsi sebagai instrumen esensial untuk membangun kesepahaman yang deliberatif dengan para pemangku kepentingan untuk membentuk arah tindakan organisasi. Sementara itu, dari perspektif efektivitas strategis, keberhasilan komunikasi tersebut harus diukur dari kemampuannya dalam menutup celah kinerja antara target dan realisasi, serta kemampuannya merespons gesekan di lapangan . Di Kabupaten Donggala, komunikasi strategis diarahkan untuk menembus ruang privat keluarga melalui pesan yang dibawa oleh peserta didik sebagai perantara, yang pada tahap awal pelaksanaannya memunculkan kebingungan dari pihak orang tua karena kurangnya sosialisasi pendahuluan dari pihak penyelenggara. Fakta ini terekam secara jelas dalam wawancara dengan Mauiza selaku wali murid Rara Fadzirah pada tanggal 12 Januari 2026 yang menyatakan, "Awalnya kami di rumah sempat bingung. Neneknya Rara bahkan sempat tanya, “Tugas apa ini? Kenapa anak SD disuruh isi?”". Kondisi kebingungan yang muncul akibat minimnya respons atau pemahaman awal masyarakat terhadap metode sosialisasi ini sangat sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di Kabupaten Malang, di mana salah satu kendala utama dalam program pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah adalah kurangnya respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh penyelenggara pemilu . Fenomena serupa juga ditemukan pada penelitian di Kota Ambon, di mana hambatan komunikasi politik sering kali muncul dari tingkat literasi yang beragam serta adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung (Noya, 2025).

Realitas komunikasi di lapangan pada jenjang yang lebih rendah sering kali mengalami distorsi makna, di mana upaya pendidikan politik terjebak pada aspek administratif pemenuhan tugas sekolah semata tanpa menyentuh substansi strategis partisipasi elektoral. Hambatan komunikasi ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Sang Putu Dharma Yuda, siswa SMP Negeri 2 Banawa, pada tanggal 15 Januari 2026 yang secara jujur menyatakan, "Kalau saya kak cuman untuk kejar nilai... [Orang tua] cuman ditanya tugas apa ini? Pas saya bilang tugas sekolah langsung diisikan kak tidak dibahas yang begituan." Distorsi komunikasi strategis ini menjadi semakin parah pada jenjang Sekolah

Dasar (SD), yang mana penyampaian pesan terputus sepenuhnya, sebagaimana diungkapkan oleh siswi SD bernama Rara Fadzirah pada tanggal 12 Januari 2026 yang secara lugas menyatakan, "Tidak ada dicerita apa-apa." Kegagalan transmisi pesan substansial di tingkat dasar ini sangat selaras dengan hambatan efektivitas pendidikan pemilih yang terjadi di Kabupaten Malang, di mana ketidakseimbangan alokasi strategi dan kurangnya penargetan program yang didasarkan pada kondisi persoalan riil pemilih membuat upaya sosialisasi menjadi tidak tepat sasaran. Kajian penelitian di Kota Palangka Raya turut memperkuat analisis ini dengan menekankan bahwa pemilih di usia dini dan pemula sering kali belum memiliki literasi politik yang memadai, sehingga mereka cenderung mengalami kegagapan informasi jika tidak diberikan panduan komunikasi politik yang berkesinambungan dan sesuai dengan kapasitas kognitif mereka (Alfitra, 2024). Namun, terdapat perbedaan kedalaman komunikasi berdasarkan jenjang pendidikan. Pada jenjang SMA, komunikasi strategis berkembang menjadi dialog pendidikan politik yang lebih substansial. Asfiatul Jannah (Orang Tua Mohammad Ghifari – SMA) menjelaskan terjadinya diskusi di rumah: "Iya, sempat bicara sedikit. Waktu saya lihat lembarannya, saya sempat tanya ke Ghifari, “Memang calon bupatinya siapa saja tahun ini?” Sebenarnya saya cuma mau ngetes dia saja, sejauh mana dia tahu. Terus dia jelaskan ke saya siapa-siapa saja calonnya.” (Irwan et al., 2023).

Pentingnya "menemukan bentuk yang mengakomodasi kekacauan", realitas komunikasi di lapangan sering kali terjebak pada aspek administratif semata daripada substansi strategis. Komunikasi antara anak dan orang tua cenderung terhenti pada pengisian formulir demi pemenuhan nilai sekolah. Hal ini terlihat pada transkrip Putu Dharma Yuda (Siswa SMP): "Kalau saya kak cuman untuk kejar nilai... [Orang tua] cuman ditanya tugas apa ini? Pas saya bilang tugas sekolah langsung diisikan kak tidak dibahas yang begituan." Hal senada diungkapkan oleh Rara Fadzirah (Siswa SD) yang menyatakan bahwa dalam proses pengisian tidak terjadi edukasi politik yang mendalam: "Tidak ada dicerita apa-apa."

Kondisi ini menunjukkan adanya celah efektivitas komunikasi. Pesan strategis untuk meningkatkan "kesadaran memilih" sering kali terdistorsi menjadi pesan "menyelesaikan tugas". Orang tua membantu mengisi data bukan karena teredukasi secara politik, melainkan karena rasa sayang dan tanggung jawab agar nilai akademik anaknya tidak jatuh.

Kelemahan struktural ini memberikan pembuktian teoritis bahwa strategi komunikasi politik dari instansi pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan kuantitas distribusi instrumen semata, melainkan wajib diimbangi dengan penargetan segmen yang sangat presisi agar program tidak berakhir membebani masyarakat tanpa menghasilkan peningkatan kualitas partisipasi pemilih yang nyata, sebagaimana permasalahan yang umum dijumpai dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di daerah-daerah partisipasi rendah lainnya.

3.6. Analisis Dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Dalam kerangka manajemen strategis sektor publik, dimensi pengawasan dan evaluasi merupakan fase krusial untuk membuktikan apakah rumusan strategi yang dirancang benar-benar menghasilkan nilai publik dan capaian kinerja secara riil di lapangan. Evaluasi kinerja tidak sekadar menilai pencapaian administratif berupa *outputs*, melainkan harus mengukur capaian substansial guna melihat sejauh mana strategi tersebut mampu menutup celah kinerja antara target aspirasional dan realisasi faktual. Penurunan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Donggala yang hanya mencapai 73,40% dari target awal sebesar 80% menunjukkan adanya kesenjangan yang membutuhkan penelusuran dan evaluasi objektif. Sebagai perbandingan empiris, evaluasi strategis yang terstruktur melalui rapat koordinasi berjenjang juga menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang diterapkan oleh KPU Kota

Denpasar dalam memantau efektivitas partisipasi masyarakat secara sistematis di tengah berbagai kendala operasional (Bryson & George, 2024) (Harianja et al., 2024).

Meskipun pemerintah daerah telah diberikan otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri, implementasi di lapangan kerap kali menghadapi berbagai kendala operasional maupun kelembagaan. Efektivitas penerapan kebijakan di tataran desentralisasi seringkali mengalami tantangan struktural; oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang transformatif serta komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam menegakkan aturan demi merealisasikan nilai-nilai *good governance* di lingkungan masyarakat . Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi yang inovatif harus berbanding lurus dengan kapasitas aparat pelaksana serta integritas pimpinan daerah dalam mendobrak hambatan struktural birokrasi, sehingga target pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal (Wibisono, 2023) (Labolo, 2022).

Berdasarkan data lapangan, mekanisme pengawasan (*monitoring*) program ini dilakukan secara berjenjang melalui jalur struktural pendidikan. Pengawasan difokuskan untuk memastikan instrumen berupa LKPD didistribusikan dan diisi secara masif. Hal ini dikonfirmasi oleh Nurfin Larimu, S.Pd., M.Pd (Pengawas Sekolah/Perwakilan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa): "Kami melakukan verifikasi melalui kunjungan rutin. Kami meminta guru kelas atau guru mata pelajaran PPKn untuk menunjukkan bukti kendali.". Langkah serupa juga diterapkan pada sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, sebagaimana disampaikan oleh Zainal Abidin, S.Ag., M.Pd (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag): "Kami melakukan monitoring melalui pengawas Madrasah. Kami meminta laporan singkat dari setiap Kepala Madrasah mengenai jumlah siswa yang telah mengembalikan lembar dukungan yang sudah ditandatangani orang tua."

Selain pengawasan internal birokrasi pendidikan, pengawasan eksternal terkait potensi penyalahgunaan program untuk mobilisasi politik juga dilakukan oleh Bawaslu. Abdul Salim, S.H (Ketua Bawaslu Donggala) menyatakan: "Selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung terkait dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)... Bawaslu Kabupaten Donggala tidak menemukan dan tidak menerima laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan LKPD sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tersebut."

Pengawasan yang dilakukan di Donggala terbukti sangat efektif dalam mengamankan output program (penyebaran LKPD dan netralitas ASN). Namun, pengawasan ini bersifat administratif dan belum mampu memantau kedalaman outcome (apakah diskusi pendidikan politik di keluarga benar-benar terjadi).

Tujuan utama strategi ini adalah mempertahankan atau melampaui angka partisipasi 80% yang diraih pada pemilu sebelumnya. Namun, realisasi Pilkada 2024 berada di angka 73,4%. Melalui teori Bert George, celah (*gap*) sebesar 6,6% ini menuntut adanya evaluasi objektif. Pihak KPU Kabupaten Donggala menyikapi realisasi ini dengan evaluasi yang proporsional. Mizul Rahyunita, S.Pd.I., M.Pd (Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas KPU Donggala) menyatakan: ”Kalau secara nasional kan targetnya 70% untuk partisipasi masyarakat jadi di angka 73% bukan berarti kita tidak puas tapi kita ambil plus minusnya untuk ke depan jadikan pelajaran supaya tingkat partisipasi itu bisa lebih meningkat lagi.”. Meskipun secara nasional strategi ini melampaui target (70%), Pemda dan KPU menyadari adanya kelemahan operasional.

Frictional forces sebagai hambatan internal maupun eksternal yang menyebabkan strategi berjalan tidak efisien. Berdasarkan hasil wawancara, setidaknya ditemukan tiga *frictional forces* utama yang menjadi catatan evaluasi: Pertama, kekeliruan penentuan sasaran (*targeting error*): Melibatkan siswa SD dan SMP terbukti menjadi beban yang tidak proporsional dan tidak efektif secara strategis. Hal ini dievaluasi secara kritis oleh Abdul Rahim (Kepala Cabang Dinas Wilayah II): ”Kalau menurut saya, yang pertama, sasarannya itu harusnya dikunci khusus untuk jenjang SMA dan SMK

saja. Tidak perlu SMP kebawah. Kenapa? Karena kalau anak SD dan SMP ikut dilibatkan seperti kemarin, jujur saja itu terlalu membebani guru-guru di tingkat dasar." Data komparatif dari beberapa penelitian terdahulu semakin memperkuat urgensi evaluasi ini, dengan membuktikan bahwa program pendidikan pemilih jauh lebih efektif apabila memprioritaskan generasi muda tingkat SMA selaku pemilih pemula yang dinilai telah memiliki kapasitas kognitif memadai untuk memahami isu demokrasi seperti yang berhasil dipraktikkan dalam model komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan program sosialiasi terarah di berbagai wilayah. Hal ini juga diamini secara eksplisit oleh pihak KPU Donggala (Mizul Rahyunita): "Kalau bisa di pemilihan selanjutnya itu hanya melibatkan anak SMA. Karena seperti kita ketahui bersama, ini kan proses penyampaian anak SD dengan SMP ini kan berbeda."

Keterlibatan masyarakat secara aktif bukan sekadar pemenuhan angka administratif, melainkan pilar utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. *Political participation allows citizens to influence the policies that affect their lives, promoting accountability, inclusion, and social cohesion. Active participation in political processes strengthens democratic institutions*. Dengan demikian, kegagalan pencapaian target partisipasi yang hanya terealisasi sebesar 73,40% di Pilkada Donggala menuntut perbaikan tata kelola yang mendasar, salah satunya dengan merekonstruksi target sasaran kebijakan agar lebih berfokus pada kelompok pemilih pemula yang terbukti memiliki kapasitas untuk memperkuat inklusi dan akuntabilitas kepemimpinan local (Venus et al., 2025)

Kedua, manajemen waktu yang lemah (*timing frictions*): Keterlambatan distribusi instrumen mengurangi ruang interaksi antara siswa dan orang tua. Nurfin Larimu (UPT Dispen Banawa) menyoroti kendala ini sebagai bahan evaluasi masa depan: "Sinkronisasi data harus lebih matang. Kadang jadwal distribusi LKPD dari kabupaten mepet dengan masa tenang. Ke depan, kami berharap instrumen ini sudah terbagi sejak tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai, agar fungsi pengawasan oleh siswa terhadap status memilih orang tuanya lebih maksimal."

Ketiga, inkonsistensi penegakan komitmen strategis (*reward and punishment*): Sebuah strategi membutuhkan disiplin eksekusi. Kegagalan membangun kedisiplinan dan minimnya stimulus rangsangan bagi partisipan ini telah dikonfirmasi oleh kajian literatur sebagai faktor utama yang melemahkan atensi audiens terhadap keberhasilan sebuah program sosialisasi jangka pendek. Paluvi et al. (2024) menyampaikan Konsep awal program ini menjanjikan nilai akademik (sebagai *reward/punishment*), namun hal ini tidak diterapkan di lapangan oleh para guru. Kegagalan penegakan komitmen ini berakibat pada melemahnya daya tekan ("daya ikat") program. Dr. H. Rustam Effendi (Sekretaris Daerah) mengevaluasi hal ini dengan sangat tajam pada akhir pelaksanaan program:

> Komitmennya berarti tidak, sehingga dianggap tidak ada belum menurutkan nilai dampak. Padahal kalau dilihat di silabusnya itu, di silabus ya, yang mereka susun itu, semua orang terakhir menilai. Berarti itu yang saya maksudkan adalah komitmen. Kalau komitmen tidak berdampak, wajar lah anak-anak ah tidak usah itu untuk Pilkada. Tidak ada gunanya ini, hanya mengancam. Nah, berarti itu ya tidak dijalankan memang.

Secara keseluruhan, analisis pada dimensi pengawasan dan evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Donggala berhasil membuktikan output administratif dari strategi "Pelibatan Peserta Didik". Efektivitas strategis (*Strategic Effectiveness*) program ini belum mencapai puncaknya karena terhalang oleh *frictional forces* yang signifikan: sasaran audiens yang terlalu luas (hingga ke SD/SMP), waktu eksekusi yang mepet, serta inkonsistensi guru dalam memberikan sanksi akademik (punishment). Evaluasi lintas sektoral (dari Sekretaris Daerah, Cabang Dinas Provinsi, Kementerian Agama, KPU, hingga pengawas sekolah) bermuara pada satu konklusi strategis: Program ini memiliki potensi "Nilai Publik" yang luar biasa, namun untuk pilkada di masa depan, desainnya harus direstrukturisasi dengan mengunci sasaran hanya pada siswa SMA/SMK (pemilih pemula) agar

implementasinya tidak membebani birokrasi pendidikan dasar dan memiliki daya ledak edukasi yang lebih presisi.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program ini telah berjalan secara masif dan terstruktur dengan memanfaatkan kolaborasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan ratusan satuan pendidikan di 16 kecamatan. Proses pelaksanaannya diwujudkan melalui pendistribusian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Modul "Kesadaran Berdemokrasi" yang diintegrasikan ke dalam kurikulum formal seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Kurikulum 2013. Siswa difungsikan sebagai "penunjuk jalan teknologi" bagi keluarga untuk mengecek DPT online. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat ketimpangan struktural, di mana program ini didominasi oleh partisipasi siswa Sekolah Dasar (54,02%) yang belum memiliki hak pilih. Pelaksanaan di lapangan juga diwarnai oleh kendala literasi digital orang tua, terbatasnya akses sinyal internet di daerah pedesaan, serta sempitnya durasi waktu pengerjaan tugas yang membuat tingkat kepatuhan pengembalian tugas fluktuatif antar-wilayah (rata-rata hanya 65,61%).

Strategi peningkatan partisipasi pemilih melalui program ini dapat disimpulkan belum berhasil atau gagal mencapai target yang diharapkan. Walaupun didukung oleh legitimasi mandat formal (Surat Edaran Sekretaris Daerah), realisasi angka partisipasi pemilih hanya menyentuh angka 73,40%, meleset secara signifikan dari target aspirasional yang ditetapkan sebesar 80%. Kegagalan strategi ini disebabkan oleh beberapa kelemahan fundamental, yakni *targeting error* (salah sasaran karena terlalu membebani siswa SD dan SMP dibandingkan mengoptimalkan pemilih pemula di tingkat SMA/SMK), *timing frictions* (waktu sosialisasi yang terlalu mepet dengan hari pencoblosan), dan lemahnya penegakan sanksi akademik yang membuat komunikasi strategis tereduksi menjadi sekadar formalitas. Selain itu, kelemahan utama dari strategi ini adalah pembebanan program pada infrastruktur sekolah secara paksa. Strategi ini tidak bisa menggunakan strategi nol rupiah atau existing resources karena akan mengganggu kegunaan sumber daya yang sudah ada. Ketiadaan anggaran khusus membuat tenaga pendidik terbebani dan dana operasional sekolah (seperti dana BOS) terganggu, sehingga efektivitas pendidikan politik tidak tercapai secara optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada pelaksanaan Program Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Donggala sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, maupun geografis yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi program berdasarkan perspektif para informan. Penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh program terhadap peningkatan tingkat partisipasi pemilih maupun perubahan perilaku politik masyarakat. Ketiga, penelitian dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan persepsi maupun keterbatasan ingatan informan terhadap proses pelaksanaan program.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi peningkatan partisipasi pemilih dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif sehingga hubungan antara pelaksanaan program dan peningkatan partisipasi pemilih dapat diukur secara lebih objektif. Selain itu, penelitian berikutnya

dapat melakukan studi komparatif pada beberapa kabupaten atau provinsi untuk mengetahui efektivitas Program Pelibatan Peserta Didik Melalui Dukungan Keluarga pada karakteristik wilayah yang berbeda. Kajian selanjutnya juga dapat memfokuskan penelitian pada efektivitas pelibatan peserta didik jenjang SMA sebagai agen pendidikan politik keluarga, mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMA memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan peserta didik jenjang SD maupun SMP. Penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi model kolaborasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan satuan pendidikan agar strategi peningkatan partisipasi pemilih menjadi lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu mencapai target partisipasi yang diharapkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini, khususnya Pemerintah Kabupaten Donggala, Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala, Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, para kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian manajemen strategis sektor publik dan peningkatan partisipasi pemilih melalui inovasi pendidikan politik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, M. A. (2024) Strategi Pendidikan Pemilih di Daerah Potensi Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang). *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(1), 75–93. https://doi.org/10.70214/5d7r9176

Asri, M. F., Saiful & Saraha, D. R. (2025). Tantangan Dan Strategi Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024. *Jurnal Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 544–556. https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.22276

Baidhowah, A. R. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.97-109

Basyari, I. (2024). Kemendagri Identifikasi Delapan Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024. *Kompas*. https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-identifikasi-delapan-penyebab-rendahnya-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024

Bawaslu. (2023). Pemilu Dan Pemilihan Serentak. *Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, 4.

Bryson, J. M. & George, B. (2024). *A Strategic Planning Process For Public And Non-Profit Organizations. Sixth Edition.* Wiley.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.

Fadilla, Q. L. & Nurussa'adah, E. (2022). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Verba Vitae Unwira: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3(1)*, 34–47. https://journal.unwira.ac.id/index.php/VERBAVITAE/article/view/1855

Harianja, G. P. D., Yudharta, I. P. D. & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–105. https://ijespgjournal.org/index.php/shkr

Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071

Irwan, A. I. U., Fauzi, E. A. & Jalianery, J. (2023). Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522–528. https://doi.org/10.59025/js.v2i4.178

Labolo, M. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT RajaGrafindo Persada.

Ligua, A. Noe, W. & Rajaloa, N. I. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Soasio Kecamatan Galela dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Geocivic*. *4*(April), 17–25. https://www.researchgate.net/publication/362086516

Mewoh, A. R. M. (2015). *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*. 1–97.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook / Matthew B. Miles*. SAGE.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.

Noya, R. S. (2025). Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kota Ambon Provinsi Maluku. *Repository IPDN*, 1–14. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24137

Putri, A. M., Duadji, N., & Faedlulloh, D. (2025). Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat: Studi di Polresta Bandar Lampung. *Administrativa : urnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7(3), 381–392. https:// administrativa.fisip.unila.ac.id

Paluvi, M. G., Rafni, A., Dewi, S. F. & Bakhtiar, Y. (2024). Implementasi Program KPU *Goes to School* Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 161–173. https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.371

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. AlfaBeta.

Suryaningsih, S., Putri, R. P., Mulya, R. A., Zamhasari, Z., & Gafar, T. F. (2025). Dinamika Politik Calon Tunggal Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Dharmasraya. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(3), 823–831. https://doi.org/10.31004/irje.v5i3.3119

Titania, A. R., & Nawangsari, E. R. (2025). Evaluasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada dalam Manajemen Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Jawa Timur. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(3), 3803–3812. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7885

Uang, D. P., Jalesy, N.M., Situmorang, A, Elvis. (2023). Developing Credible Government Leadership: Indonesian Public Policy Views. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 197–213. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3666

Uddin, H. R., Ruhadi, & Arditama, E. (2023). Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Implementasi*, *3*(2), 181–185. http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index

Venus, A., Intyaswati, D., Ayuningtyas, F., & Lestari, P. (2025). Political participation in the digital age: Impact of influencers and advertising on Generation Z. *Cogent Arts & Humanities*, *12*(1), 1–

15. https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2520063
Wan, J., Wang L., Saade R., Guan, H. & Liu, H. (2022). Empirical Analysis of Strategic Management in Inter-Governmental Organization. *Administrative Sciences*, 12(83), 1–26. . https://doi.org/10.3390/admsci12030083
Wibisono, R. B. (2023). Keadilan Iklim dan Ham di Indonesia: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 95–125. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.5017